

Judul : KPK Periksa Taufik Kurniawan
Tanggal : Kamis, 01 November 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

KPK Periksa Taufik Kurniawan

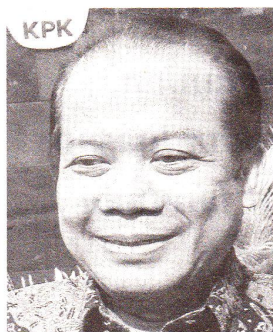
[JAKARTA] Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, Kamis (31/10).

Taufik diketahui telah menyangang status tersangka kasus dugaan suap pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN perubahan tahun anggaran 2016.

"Agenda pemeriksaan TK (Taufik Kurniawan, Red) hari ini dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis pagi.

KPK mengingatkan Taufik untuk kooperatif dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya. Sikap kooperatif itu salah satunya dapat ditunjukkan dengan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa perdana sebagai tersangka pada hari ini.

Febri enggan berspekulasi adanya kemungkinan tim penyidik bakal langsung menahan Taufik sesudah pemeriksaan. Dikatakan, yang terpenting saat ini, Taufik kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.



Taufik Kurniawan

"Kami percaya yang bersangkutan akan kooperatif, nanti kami lihat," kata Febri.

Pemanggilan kali ini menjadi pemanggilan perdana yang dilayangkan KPK terhadap Taufik setelah menyangang status tersangka.

Diberitakan, KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus dugaan suap. Taufik diduga menerima suap Rp 3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN 2016.

Suap itu diduga merupakan bagian dari *fee* sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen

Sikap MKD DPR

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih memantau kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. MKD akan menggelar rapat soal kasus Taufik pada masa sidang mendatang. Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap.

"Proses penetapan sudah terjadi. Nanti MKD akan melakukan pemantauan sampai sejauh mana proses itu. Nanti kita akan bicarakan pada rapat internal. Awal sidang setelah reses nanti," ujar Sufmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Secara aturan, kata Sufmi, Taufik baru bisa dicopot sebagai anggota DPR bila putusan hukumnya sudah inkrah. Taufik tidak bisa dicopot hanya karena statusnya tersangka. "Kalau UU MD3 kan harus inkrah dulu kemudian baru diadakan proses-proses. Itu kalau di internal DPR," katanya.

Untuk posisi Wakil Ketua DPR, Sufmi mengatakan, pihaknya masih mempelajari. Ia enggan berkomentar lebih jauh, karena penetapan tersangka Taufik baru saja dilakukan. [W-12]

yang direncanakan mendapat Rp 100 miliar.

Transaksi di Hotel

Pertemuan dan penyerahan uang kepada Taufik dilakukan secara bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Teridentifikasi, transaksi suap dilakukan melalui kamar hotel dengan *connecting door* atau pintu penghubung kamar. Setelah transaksi suap, dalam pengesahan APBN Perubahan

tahun anggaran 2016, Kabupaten Kebumen mendapat DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar yang rencananya dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Taufik telah dimintai keterangan saat proses penyelidikan pada awal September 2018. Bahkan, KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Taufik berpergian keluar negeri selama enam bulan ke depan. [F-5]